



## Islam dan Demokrasi: Kajian Pemikiran Teologis dan Praktik Politik di Indonesia

Vindy Rina Auliasari<sup>1\*</sup>, Mukhsin Achmad<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang Km 14,5, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

\*Korespondensi penulis: [24914017@students.uii.ac.id](mailto:24914017@students.uii.ac.id)

**Abstract.** *Islam and democracy are often considered two concepts with fundamental differences, particularly in terms of sovereignty, law, and decision-making processes. However, in the context of Indonesia, these two concepts have interacted in a unique and dynamic way. As the largest democratic country with a Muslim majority, Indonesia serves as a social laboratory for testing the compatibility between Islam and democracy. This research examines the Muslim community's response to democracy through two main approaches: theological thinking rooted in Islamic values such as syura (consultation), 'adalah (justice), and musawah (equality), as well as political practices reflected in Muslim participation in Indonesia's democratic system. Furthermore, this research explores the role of Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in promoting inclusive democracy, as well as the challenges faced, such as radicalism and identity politics. The research findings indicate that Islam is not only compatible with democracy but also enriches democratic values through ethical and moral principles. Thus, this paper provides an important contribution to understanding the relationship between Islam and democracy, particularly in the Indonesian context.*

**Keywords:** *Democracy, Indonesia, Islam, Politics, Theology.*

**Abstrak.** Islam dan demokrasi sering kali dianggap dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam hal kedaulatan, hukum, dan proses pengambilan keputusan. Namun, dalam konteks Indonesia, kedua konsep ini telah berinteraksi secara unik dan dinamis. Sebagai negara demokrasi terbesar dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menjadi laboratorium sosial untuk menguji kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. Penelitian ini mengkaji respon umat Islam terhadap demokrasi melalui dua pendekatan utama, yaitu pemikiran teologis yang berakar pada nilai-nilai Islam seperti syura (musyawarah), keadilan ('adalah), dan persamaan (musawah), serta praktik politik yang tercermin dalam partisipasi umat Islam dalam sistem demokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam mendorong demokrasi yang inklusif, serta tantangan yang dihadapi, seperti radikalisme dan politik identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan demokrasi, tetapi juga mampu memperkaya nilai-nilai demokrasi melalui prinsip-prinsip etis dan moral. Dengan demikian, paper ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara Islam dan demokrasi, khususnya dalam konteks keindonesiaan.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Indonesia, Islam, Politik, Teologi.

## **1. LATAR BELAKANG**

Hubungan antara Islam dan demokrasi telah menjadi salah satu topik yang banyak diperdebatkan, baik di kalangan intelektual Muslim maupun dalam wacana politik global. Islam, sebagai agama dengan sistem nilai yang komprehensif, sering dianggap memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan demokrasi modern, terutama terkait konsep kedaulatan. Dalam Islam, kedaulatan mutlak ada pada Allah SWT, sedangkan demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Meski demikian, berbagai ulama dan cendekiawan Muslim menyatakan bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi, seperti musyawarah (syura), kebebasan ('huriyat), dan persamaan (musawah).

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadirkan dinamika unik dalam interaksi antara Islam dan demokrasi. Sejak era Reformasi, demokrasi Indonesia telah membuka ruang yang luas bagi partisipasi umat Islam dalam politik (Susanti 2024). Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam mendukung proses demokratisasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam konservatif dan radikal sering kali mengkritik demokrasi sebagai sistem yang tidak sesuai dengan syariah, sehingga memunculkan tantangan bagi integrasi Islam dalam demokrasi.

Prespektif Teologis Islam, sebagai agama yang bersifat universal, memiliki nilai-nilai yang mendukung prinsip demokrasi, seperti musyawarah (syura), kebebasan ('huriyat), dan persamaan (musawah). Syura, misalnya, menggaris bawahi pentingnya pengambilan keputusan kolektif, yang sejalan dengan prinsip partisipasi dalam demokrasi. Namun, terdapat pandangan bahwa sistem demokrasi yang bersumber dari Barat tidak sepenuhnya kompatibel dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam isu kedaulatan. Dalam Islam, kedaulatan mutlak berada di tangan Allah, sedangkan dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat.

Praktik Politik Islam dan Demokrasi di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memberikan contoh unik mengenai interaksi antara Islam dan demokrasi. Setelah reformasi 1998, demokrasi di Indonesia berkembang pesat dengan tetap mempertahankan identitas Islam. Partai politik berbasis Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahteraan (PKS), memainkan peran penting dalam demokrasi Indonesia (JINAYAH n.d.). Namun, tantangan muncul dalam bentuk polarisasi politik berbasis agama, yang terkadang mengaburkan batas antara kepentingan politik dan nilai-nilai Islam. Tantangan dan Peluang utama dalam mengintegrasikan Islam dan demokrasi adalah adanya interpretasi konservatif yang menolak demokrasi sebagai sistem yang sesuai dengan Islam. Selain itu, praktik politik yang menggunakan sentimen agama untuk

kepentingan elektoral dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Namun, peluang juga muncul dari upaya intelektual Muslim Indonesia yang terus mengembangkan pemikiran Islam moderat yang mendukung demokrasi, seperti yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.

Namun, hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari tantangan. Politik identitas berbasis agama sering kali digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik, yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial. Selain itu, munculnya kelompok-kelompok radikal yang menolak demokrasi dan mengusung sistem khilafah menunjukkan adanya resistensi terhadap demokrasi dalam sebagian kecil umat Islam. Tantangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan secara harmonis di Indonesia.

Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Islam dan demokrasi dengan fokus pada dua aspek utama: pemikiran teologis Islam tentang demokrasi dan praktik politik umat Islam di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam dan demokrasi dapat saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola yang adil dan inklusif. Kajian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi umat Islam Indonesia dalam memperkuat demokrasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia, penting untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar yang berasal dari kedua konsep ini dan bagaimana keduanya berinteraksi dalam ranah sosial-politik di Indonesia. Kajian teoritis ini akan mencakup pemikiran teologis Islam mengenai demokrasi, serta beberapa prinsip demokrasi yang dapat diperoleh dari ajaran Islam, seperti *syura* (musyawarah), *'adalah* (keadilan), dan *musawah* (persamaan). Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik politik di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam integrasi antara Islam dan demokrasi.

### **Pemikiran Teologis Islam tentang Demokrasi**

Pemikiran teologis Islam mengenai demokrasi berkaitan dengan pandangan Islam tentang pemerintahan dan hubungan antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat. Dalam Islam, prinsip-prinsip ini selalu diturunkan dalam pengertian yang universal dan berorientasi

pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip utama dalam ajaran Islam yang mendukung penerapan sistem demokrasi.

a. Syura (Musyawarah)

Konsep *syura* atau musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang mendasari proses pengambilan keputusan. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang mendukung pentingnya musyawarah sebagai mekanisme untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umat (Q.S. 3:159). Sejak masa Nabi Muhammad SAW, *syura* telah dijalankan, baik dalam pengambilan keputusan negara maupun dalam kehidupan sosial. Dalam praktik politik, musyawarah ini mengilhami pentingnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Meskipun sistem demokrasi modern menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, prinsip *syura* menawarkan landasan untuk demokrasi partisipatif dalam Islam.

Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, konsep *syura* diterapkan secara nyata dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut kepentingan umat (Efendi 2024). Abu Bakar selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk memutuskan kebijakan, dan Umar bin Khattab bahkan membentuk dewan pemilih untuk memilih penggantinya ketika beliau sakit. Hal ini mengindikasikan bahwa *syura* adalah prinsip dasar yang mengutamakan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan publik, yang berhubungan erat dengan sistem demokrasi modern yang mengutamakan partisipasi rakyat.

b. Keadilan ('Adalah): Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak diperlakukan sama di hadapan hukum dan dalam kehidupan sosial (QS. An-Nisa:92). Dalam sistem demokrasi, keadilan ini diterjemahkan ke dalam perlindungan hak asasi manusia, pembagian sumber daya yang adil, dan pemerintahan yang transparan. Islam mendukung sistem hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, yang menjadi dasar bagi sistem demokrasi yang inklusif. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa prinsip '*adalah*' harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, agar tercipta keadilan bagi setiap individu, terlepas dari status sosial, etnis, atau kekuasaannya.

c. Persamaan (Musawah):

Islam juga mengajarkan prinsip persamaan derajat antar umat manusia, tanpa memandang status sosial atau etnis (QS. Al-Hujurat:13). Konsep *musawah* ini menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap individu memiliki hak yang sama dalam

segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik dan pembagian kekuasaan (Shobahah 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menekankan pada kesetaraan hak politik. Dalam sistem demokrasi yang ideal, setiap individu harus diperlakukan setara, baik dalam hak untuk memilih maupun untuk dipilih, serta dalam mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

### **Demokrasi di Indonesia dan Aplikasi Prinsip Islam**

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar dengan mayoritas penduduk Muslim, memberikan contoh konkret tentang bagaimana Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan. Dalam kehidupan politik Indonesia, prinsip-prinsip Islam seperti *syura*, *'adalah*, dan *musawah* diterjemahkan dalam praktik politik demokrasi (Syahdiyono 2022). Misalnya, partisipasi umat Islam dalam pemilu, keterlibatan organisasi Islam dalam politik, serta perkembangan partai-partai politik berbasis Islam seperti PKS, PPP, dan PKB.

Setelah era Reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi politik yang signifikan dengan hadirnya sistem demokrasi yang lebih terbuka. Partisipasi politik umat Islam pun meningkat pesat, yang tercermin dalam banyaknya partai politik Islam yang turut berkompetisi dalam pemilu dan berperan dalam kebijakan publik. Namun, meskipun Islam mendukung prinsip-prinsip demokrasi, tantangan besar tetap ada, terutama dalam bentuk politik identitas dan kelompok radikal yang menolak sistem demokrasi.

Dalam beberapa kasus, penggunaan agama sebagai alat politik identitas dapat mengarah pada polarisasi sosial, yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya usaha yang bijak untuk memastikan bahwa Islam dapat berperan dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat tanpa membahayakan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Peran Organisasi Islam dalam Memperkuat Demokrasi**

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi Islam terbesar, telah berperan dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif. NU, dengan pendekatan *Islam Nusantara*, mendukung pluralisme dan toleransi antaragama, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan kebebasan beragama dan berpendapat. Muhammadiyah, dengan ajaran *Islam berkemajuan*-nya, lebih menekankan pada pentingnya

pendidikan, pembangunan sosial, dan modernisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan demokrasi.

Selain itu, organisasi-organisasi ini juga berperan dalam meredam konflik sosial yang muncul akibat ketegangan politik berbasis agama. Dengan demikian, NU dan Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai pembela agama, tetapi juga sebagai pendorong bagi terciptanya demokrasi yang adil dan inklusif.

### **Tantangan dalam Mengintegrasikan Islam dan Demokrasi**

Beberapa tantangan utama dalam mengintegrasikan Islam dan demokrasi di Indonesia antara lain adalah politik identitas dan radikalisme Islam. Politik identitas berbasis agama sering kali memperburuk polarisasi sosial dan politik, yang dapat mengancam nilai-nilai inklusivitas dan persatuan dalam demokrasi (Erinaldi 2024). Kelompok-kelompok radikal yang menolak demokrasi, dengan mengusung ideologi khilafah atau sistem pemerintahan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, juga menjadi hambatan bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, perbedaan dalam interpretasi terhadap syariah di kalangan umat Islam sering kali menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam sistem demokrasi. Beberapa kelompok Islam menganggap bahwa demokrasi, sebagai sistem yang bersumber dari Barat, tidak sepenuhnya kompatibel dengan ajaran Islam, terutama dalam hal kedaulatan yang dianggap hanya milik Allah.

### **Peluang Penguatan Islam dan Demokrasi**

Terdapat peluang besar untuk memperkuat hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia. Salah satu peluang tersebut adalah moderasi Islam (Huda 2021). Organisasi-organisasi Islam moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, dapat berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi, dengan mempromosikan toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif juga dapat membantu memperkuat dukungan terhadap demokrasi yang adil dan bermoral. Konsep *syura*, '*adalah*, dan *musawah* dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun demokrasi yang berkeadilan, menghargai kebebasan individu, dan mengutamakan persamaan hak.

Indonesia, dengan keberhasilannya mengintegrasikan Islam dan demokrasi, dapat menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel, tetapi juga saling memperkaya, sehingga dapat

menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara Islam dan demokrasi dalam konteks teologis dan praktik politik di Indonesia. Metode ini dipilih karena relevan untuk memahami fenomena sosial, politik, dan keagamaan yang kompleks. Berikut adalah rincian metodologi yang digunakan.

#### Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan pandangan teologis Islam terhadap demokrasi.
- b. Menganalisis implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik politik demokrasi di Indonesia.
- c. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan Islam dan demokrasi.

#### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama:

- a. Data Primer:
  - 1) Wawancara mendalam dengan pakar, ulama, akademisi, dan aktivis organisasi Islam (seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) yang memiliki pandangan tentang hubungan Islam dan demokrasi.
  - 2) Observasi terhadap wacana publik, seperti ceramah agama, seminar, atau forum diskusi terkait Islam dan demokrasi.

- b. Data Sekunder:

Tipe penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang sumber data primernya dan sumber data sekundernya berupa literatur kepustakaan, berupa buku-buku, artikel dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian, yakni demokrasi dan tokoh-tokoh filosofi muslim dan barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengutipan langsung dan tidak langsung.

### **Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Literatur: Mengumpulkan teori, pandangan ulama, dan konsep teologis terkait demokrasi dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal akademik, buku, dan dokumen organisasi Islam.
- b. Wawancara Semi-Terstruktur: Dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari narasumber yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang topik ini.
- c. Analisis Dokumen: Mengkaji dokumen resmi dari organisasi Islam dan partai politik berbasis Islam untuk memahami pandangan mereka tentang demokrasi.
- d. Analisis Wacana: Menggunakan metode analisis kritis untuk mengkaji retorika atau wacana publik yang berkembang di kalangan umat Islam terkait demokrasi.

### **Batasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan:

- a. Fokus pada konteks Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk negara Muslim lainnya.
- b. Data primer hanya mencakup pandangan ulama, aktivis, dan akademisi, sehingga tidak menggambarkan persepsi masyarakat Muslim secara keseluruhan.
- c. Kajian ini lebih menitikberatkan pada hubungan Islam dan demokrasi daripada mengeksplorasi hubungan agama lain dengan demokrasi.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Islam dan demokrasi berinteraksi di Indonesia, baik dari segi pemikiran teologis maupun praktik politik. Hasil analisis diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang kompatibilitas Islam dengan demokrasi serta memberikan kontribusi akademik dalam studi politik dan agama.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemikiran Teologis Islam tentang Demokrasi**

Islam memiliki sejumlah prinsip yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, meskipun sistem demokrasi modern bukanlah konsep yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis (Abdillah 2014). Berdasarkan kajian literatur dan wawancara dengan pakar, terdapat tiga prinsip utama dalam Islam yang mendukung demokrasi:

- a. Musyawarah (Syura)

Dalam mendiskusikan hubungan antara Islam dan politik, konsep *shura* bisa dipandang sebagai konsep yang sangat penting. *Shura* mempunyai mempunyai

signifikansi yang tinggi, tidak hanya dikenal di komunitas muslim tetapi juga pada komunitas internasional. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa istilah ini banyak dipakai terutamanya di negara-negara mayoritas muslim seperti istilah *nadwah* dan “*majlis council*” atau “*majlis shura* (Safitri et al. 2023a). Pentingnya *shura* yang diadopsi oleh partai-partai politik Islam di Asia Tenggara dapat kita lihat pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Kedua partai ini menjadikan Majelis Shura dan Majelis Shura Ulama sebagai institusi tertinggi partai yang berfungsi sebagai lembaga terakhir dalam memutuskan kebijakan partai termasuk menentukan presiden partai dalam kasus PKS.

Para pemikir muslim setuju bahwa *shura* seperti disebutkan Al-Quran (Al-Imran:159), adalah wajib dalam kehidupan politik para pemimpin Islam. Kewajiban bagi pemimpin muslim untuk selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik

لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَانْفَعُوا الْقَلْبَ غَلِيظًا فَظًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لَئِنَّ اللَّهَ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا  
 ١٥٩ ﴿الْمُتَوَكِّلِينَ يُجِبُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى فِتْوَاكَ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ

*Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Al-Imran:159)*

Konsep *shura* ini telah diimplementasikan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar misalnya, selalu mengadakan musyawarah dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Abu Bakar membentuk dewan *Majlis Shura* tempat dia meminta nasihat dan bermusyawarah terkait dengan keputusan yang dia ambil sebagai pemimpin. Majelis ini terdiri dari perwakilan orang-orang dari kaum *Muhajirin* dan *Ansar* seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Zayd bin Tsabit, Abdullah bin Masud, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf dan Kaab bin Ubai (Nurdin 2016).

Bahkan lebih jelas lagi ketika khalifah kedua Umar bin Khattab mengadopsi konsep *shura* tatkala beliau dalam keadaan sakit, menjelang kematiannya membentuk sebuah dewan yang terdiri dari enam orang sahabat nabi untuk mendiskusikan dan memutuskan siapa yang akan menggantikan Umar sebagai khalifah jika ia wafat. Artinya, sebelum kematiannya, Umar telah menunjuk sebuah

komite pemilihan untuk memilih penggantinya. Keenam anggota komite itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Awf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaydah dan Abdullah bin Umar.

Dengan menunjuk komite pemilihan, terlihat jelas bahwa Umar lebih suka membiarkan proses pemilihan penggantinya terbuka dan diserahkan kepada komite enam itu untuk memutuskan siapa yang berhak dan pantas menggantikan Umar. Setelah beberapa hari bermusyawarah dan berdebat, komunitas Muslim Madinah ketika itu berhasil memperkecil jumlah pilihan kepada dua orang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Dan setelah musawarah yang intensif terpilihlah Utsman sebagai khalifah menggantikan Umar.

Berdasarkan kepada praktek *shura* yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, (Thaib 1995) berkata, "Berkaitan dengan konteks (zaman sahabat) yang disebutkan di atas, makna dari definisi konsep *shura* dalam sebuah sistem pemerintahan adalah untuk mengevaluasi opini atau pandangan-pandangan masyarakat umum yang berkaitan dengan sebuah masalah kepentingan umum agar bisa menciptakan situasi negara atau masyarakat yang sehat dan kondusif. Proses evaluasi ini bisa langsung ditanyakan kepada masing-masing individu anggota masyarakat atau dengan cara sistem perwakilan". Adanya konsep *shura* dalam ajaran Islam merupakan alasan utama bagi ilmuwan muslim seperti Fazlur Rahman, Hamid Enayat, Mohammad Natsir, Ahmad Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid untuk percaya bahwa Islam adalah kompatibel dengan demokrasi

b. Kebebasan atau Huriyat

Salah satu dasar terpenting dalam ajaran Islam adalah adanya konsep kebebasan atau *freedom*. Manusia dalam Islam adalah bebas dari tekanan politik dan agama. Menurut ajaran Islam, Tuhan telah menciptakan manusia dalam keadaan bebas memilih dalam berpendapat maupun melakukan perbuatan seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 35-39.

Dalam Islam, manusia diberikan keinginan dan kemampuan untuk memilih tanpa paksaan dari Tuhan. Beberapa ayat Al-Quran bisa dikutip disini untuk menunjukkan bahwa Islam secara jelas telah mempromosikan gagasan kebebasan dalam segala aspek kehidupan manusia. Contohnya: *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ* (Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) (QS, 109:6). Diantara ayat-ayat Al-Quran di atas, konsep terpenting tentang kebebasan adalah konsep kebebasan beragama dan

kebebasan berekspresi. Doktrin Al-Quran *la ikraha fi diin* merupakan bukti kuat diberikannya kebebasan bagi manusia. Argumen logisnya adalah jika Tuhan tidak memaksa kita untuk mempunyai agama dan kepercayaan yang sama untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing individu beragama ataupun tidak beragama, merupakan keputusan paling krusial dalam kehidupan seseorang, maka mengapa Tuhan perlu membatasi kebebasan manusia dalam hal-hal yang tidak lebih penting dari agama? Seperti dikemukakan Huwaydi, “Jika Tuhan sudah mendeklarasikan tidak ada paksaan dalam beragama, seharusnya tidak ada paksaan pula dalam mengatur masalah-masalah duniawi lainnya yang tidak masuk kategori prioritas seperti kehidupan dunia, termasuk didalamnya masalah politik” (Huwaydi, 1993).

c. Persamaan (Musawah)

Konsep persamaan derajat dipandang sebagai salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam. Jika melihat hukum Islam, akan ditemukan penekanan pada prinsip persamaan derajat manusia ketika sebuah hukum diundangkan dan diimplementasikan oleh Rasulullah saw, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an (Al-Imran: 92). Nabi Muhammad saw mengibaratkan konsep persamaan derajat dengan contoh perbandingan yang sederhana seperti sisir, “manusia mempunyai derajat yang sama bagaikan gigi-gigi sebuah sisir; tidak ada superioritas bagi orang Arab terhadap orang non-Arab kecuali karena kadar ketaqwaannya. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa seluruh manusia harus dipandang dan diperlakukan sama di depan hukum. Dalam aturan Islam, setiap orang harus dipandang sederajat tanpa memandang status sosial, jabatan politik atau kekuasaan yang dimiliki. Prinsip persamaan derajat dalam Islam mempunyai pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain prinsip-prinsip di atas, Islam juga dipandang kompatibel dengan demokrasi karena dalam Islam ditemukan tradisi yang mendorong setiap individu untuk mempromosikan kebebasan berpendapat dan melakukan debat publik dalam bentuk *ijtihad*, *ijma*, *ikhtilaf*, *istishlah*, *tasamuh*, dan *tahasub* (Safitri et al. 2023b).

### **Praktik Politik Umat Islam dalam Demokrasi Indonesia**

Indonesia memberikan contoh unik bagaimana Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan. Sejak era Reformasi, partisipasi politik umat Islam meningkat secara signifikan, yang tercermin dalam beberapa hal berikut:

a. Peran Partai Politik Islam

Partai berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi aktor penting dalam demokrasi Indonesia. Meskipun tidak selalu berhasil mendominasi suara, partai-partai ini memiliki pengaruh besar dalam kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Peran Organisasi Islam

Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam memperkuat demokrasi. NU melalui pendekatan "Islam Nusantara" mendukung pluralisme dan toleransi, sementara Muhammadiyah mengedepankan Islam yang berkemajuan untuk mendukung pembangunan bangsa.

c. Keterlibatan Umat Islam Dalam Pemilu:

Tingginya partisipasi umat Islam dalam pemilu menunjukkan dukungan besar terhadap demokrasi. Fenomena ini menggambarkan penerimaan umat Islam terhadap sistem demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

### **Tantangan dalam Mengintegrasikan Islam dan Demokrasi**

Meskipun Islam dan demokrasi dapat saling melengkapi, terdapat tantangan yang harus diatasi:

a. Politik Identitas

Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas berbasis agama telah meningkat, terutama dalam pemilihan kepala daerah dan presiden. Hal ini berpotensi memecah belah masyarakat dan melemahkan prinsip inklusivitas dalam demokrasi.

b. Kelompok Radikal

Beberapa kelompok Islam radikal menolak demokrasi, menganggapnya sebagai sistem yang tidak Islami, dan menyerukan penerapan sistem khilafah. Resistensi ini menjadi tantangan besar bagi proses demokratisasi di Indonesia.

c. Perbedaan Tafsir Syariah Dan Demokrasi

Beragamnya interpretasi terhadap syariah di kalangan umat Islam sering kali menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam demokrasi.

## **Peluang Penguatan Islam dan Demokrasi**

Meskipun ada tantangan, terdapat peluang besar untuk memperkuat hubungan antara Islam dan demokrasi:

a. Peran moderasi islam :

NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat terus mendorong nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan inklusivitas, yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

b. Pendidikan politik islami:

Pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam dapat membantu membangun kesadaran umat untuk mendukung demokrasi yang sehat, adil, dan bermoral.

c. Kontribusi islam terhadap demokrasi global:

Keberhasilan Indonesia dalam memadukan Islam dan demokrasi dapat menjadi model bagi negara-negara lain dengan mayoritas Muslim.

## **Islam sebagai Penguat Demokrasi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan demokrasi, tetapi juga dapat memperkaya demokrasi melalui nilai-nilai etisnya. Prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan yang diajarkan Islam dapat memperkuat fondasi demokrasi, khususnya di Indonesia.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemikiran teologis Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika politik di Indonesia. Ajaran agama, khususnya Islam, memberikan landasan untuk pengambilan keputusan politik yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Namun, penerapannya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis yang dapat menciptakan tantangan, terutama terkait dengan pluralitas pemikiran teologis yang dapat memperkaya demokrasi, namun juga dapat menimbulkan konflik politik identitas yang eksklusif.

Politik identitas berbasis agama menjadi salah satu tantangan terbesar dalam integrasi teologi dan politik, karena dapat memicu polarisasi sosial yang mengurangi nilai-nilai inklusivitas agama. Meskipun demikian, nilai-nilai teologis, jika diterapkan secara inklusif dan moderat, dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan mendukung prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasari pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tantangan dalam mengintegrasikan teologi dan politik mencakup isu sekularisasi, politisasi agama, dan ketimpangan antara idealisme teologis dan realitas politik, yang membutuhkan upaya kolektif untuk mencapai keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai demokrasi. Namun, dengan pendekatan moderasi, pendidikan politik berbasis nilai-nilai agama yang inklusif, serta keterlibatan aktif tokoh agama dalam mendorong politik etis, terdapat peluang besar untuk menciptakan harmoni antara teologi dan politik di Indonesia.

Secara keseluruhan, pemikiran teologis di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat praktik politik yang etis, adil, dan demokratis, yang hanya dapat tercapai jika hubungan antara agama dan politik dikelola secara bijaksana, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi alat legitimasi politik, tetapi juga sumber inspirasi dalam membangun bangsa yang lebih harmonis dan demokratis.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. (2014). Islam dan hak asasi manusia: Penegakan dan problem HAM di Indonesia. *Jurnal Miqot*, 38(2).
- Efendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78.
- Erinaldi, E. (2024). Politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1–13.
- Huda, M. T. (2021). Pengarusutamaan moderasi beragama: Strategi, tantangan dan peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 283–300.
- Huwaydi, F. (1993). *Al-Islam wa al-dimuqratiyya*. Cairo: Markaz al-Ahram Lil-Tarjama Wa l-Nashr.
- JINAYAH, J., & Jurusan Siyasa. (n.d.). Analisis pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang partai politik Islam di Indonesia [Skripsi].
- Nurdin, A. A. (2016). Kaji ulang konsep hubungan Islam dan demokrasi. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(1), 1–30.
- Safitri, S., Sofya, L., Sylviani, S., & Cahyadi, R. E. (2023a). Permasalahan mengenai hubungan Islam dengan demokrasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26815–26821.
- Safitri, S., Sofya, L., Sylviani, S., & Cahyadi, R. E. (2023b). Permasalahan mengenai hubungan Islam dengan demokrasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26815–26821.
- Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah dan konsep demokrasi modern Islam masa klasik. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 195–214.

Susanti, E. (2024). The contribution of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in strengthening democracy in Indonesia: A study of moderate Islamic politics. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 1(01), 123–136.

Syahdiyono, F. (2022). Sistem demokrasi Indonesia menurut perspektif Islam. *AL-MANSYUR*, 1(2), 1–20.

Thaib, L. (1995). *The Islamic polity and leadership*.